

## **PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI EKSTISTENSI BUMDES (STUDI KASUS BUMDES TARAKAN DESA BOBANEHENA KABUPATEN HALMAHERA BARAT)**

**Jufri Jacob<sup>1</sup>, Murdiyanti<sup>2</sup>,  
Program Pascasarjana Universitas Khairun**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana dampak dari segi ekonomi masyarakat setelah adanya BUMDES; bagaimana dampak dari segi pendidikan masyarakat setelah adanya BUMDES; menganalisis bagaimana dampak dari segi kesehatan masyarakat setelah adanya BUMDES.

Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis data sebagai berikut: (a) Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, serta mengumpulkan data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil wawancara dengan informan penelitian dan dokumen di lapangan yang berkaitan dengan dampak kebijakan BUMDES bagi Kesejahteraan masyarakat di Desa Bobanehena. (b). Mereduksi dan memilah data hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi. (c). Display Data disajikan dalam bentuk teks naratif untuk menjelaskan proses yang terjadi dari tahap perencanaan pembangunan BUMDES hingga tahap implementasi serta dampak yang ditimbulkan bagi kesejahteraan masyarakat Desa Bobanehena.(d). Pengambilan kesimpulan melalui evaluasi *single program before after* untuk memperoleh hasil dari kebijakan di Desa Bobanehena mengenai keadaan masyarakat sebelum dan setelah adanya BUMDES.

Hasil analisis melalui evaluasi *single program before after* ditemukan bahwa keberadaan BUMDes membawa perubahan yang signifikan di bidang ekonomi dan juga sosial. Pergeseran nilai sosial dan juga perubahan pola interaksi antar warga akan terjadi. BUMDes memberikan peningkatan Pendapatan Asli Desa, namun pendapatan ini tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan warga berpendapat bahwa keberadaan BUMDes tidak membawa manfaat signifikan bagi peningkatan kesejahteraan warga. BUMDes dan Pemerintah Desa memiliki relasi yang erat, karena Pemerintah Desa menjadi pengawas dari kegiatan yang dilakukan BUMDes. Dalam pengambilan keputusan, BUMDes menggunakan mekanisme musyawarah dan Pemerintah Desa adalah pemangku kepentingan utama yang terlibat dalam musyawarah tersebut. Hal yang menjadi tantangan bagi BUMDes dan Pemerintah Desa adalah menjaga keseimbangan relasi, dimana dominasi satu pihak terhadap pihak lainnya patut dihindari. Komunikasi dan sosialisasi merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh BUMDes. Profesionalisme menjadi tuntutan bagi pengelola BUMDes. Pengelola BUMDES perlu meningkatkan kualitas pelayanan dan juga kemampuan mengelola organisasi.

***Kata Kunci: Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Eksistensi Bumdes***

## Latar Belakang

Implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sebagai bagian dari keperpihakan negara terhadap desa dalam mendorong percepatan pembangunan desa termasuk dalam upaya untuk pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan. Mustanir (2019) menemukan dalam risertnya bahwa Empat hal yang perlu kita fikirkan bersama dalam pengelolaan BUMDes. *pertama*, mengenali dan menggali potensi masing-masing desa dan mencari cara untuk mengelola potensi tersebut. *Kedua*, mendorong aliran dana CSR oleh swasta untuk mendukung permodalan BUMDes. *Ketiga*, mendorong munculnya inisiasi dari pemerintah desa. *Keempat*, mendorong peningkatan partisipasi masyarakat secara nyata. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes.

Era Tama dan Yanuardi, (2017) membuktikan bahwa BUMDES telah berhasil memberi dampak yang positif bagi peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat meskipun unit-unit dari BUMDES belum berjalan secara keseluruhan. BUMDES Karangrejek juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat desa yang lebih terjamin. Pembangunan desa pun semakin lancardengan adanya dana yang dihasilkandariBUMDES. Selain itu adanya tingkat partisipasi masyarakat yang begitu tinggi membuat BUMDES Karangrejek semakin maju.

Salah satu BUMDes yang didirikan dengan tujuan sebagai penopang atau penguat ekonomi desa adalah BUMDes Tarakan yang didirikan pada 10 Januari 2017 sebagai penguatan ekonomi desa Bobanehena. Sebagai

salah satu desa di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, desa Bobanehena dinilai mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya terutama di bidang Pariwisata, pertanian, Perikanan dan unit usaha ekonomi produktif industri kecil dan perdagangan. Dengan MISI menjadikan potensi desa sebagai sumber kemakmuran rakyat maka, BUMDes “**TARAKAN**” memandang perlu melakukan berbagai perencanaan strategis yang dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran guna mempercepat proses rehabilitasi ekonomi masyarakat di Desa Bobanehena, dan refitalisasi pengelolaan potensi desa dengan keterampilan dan sumber daya manusia dan dukungan permodalan agar pertumbuhan ekonomi masyarakat mengalami peningkatan sesuai kebutuhan dan keinginan masyarakat. BUMDes Tarakan dibentuk berdasarkan Musyawarah Desa pada tanggal 10 Januari 2017 dan telah dituangkan dalam Peraturan Desa Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pendirian dan pembentukan Bumdes, serta Keputusan Kepala Desa Nomor 017 Tahun 2017 tentang kepengurusan Bumdes Tarakan Desa Bobanehena. BUMDes Tarakan memiliki visi dan tujuan yang jelas, dan telah memiliki rencana kerja jangka pendek, menengah dan panjang yang sinergi dan dijadikan sebagai acuan bagi Bumdes Tarakani dalam menjalankan usahanya.

## Tujuan

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana dampak dari segi ekonomi masyarakat setelah adanya BUMDES; bagaimana dampak dari segi pendidikan masyarakat setelah adanya BUMDES; menganalisis bagaimana dampak dari segi kesehatan masyarakat setelah adanya BUMDES

## Eksistensi BUMDes

BUMDes merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah desa serta masyarakat mengelola institusi tersebut berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa. BUMDes dibentuk berlandaskan atas peraturan perundang-undang yang berlaku atas kesepakatan antar masyarakat desa. Tujuan BUMDes adalah meningkatkan dan memperkuat perekonomian desa. BUMDes memiliki fungsi sebagai lembaga komersial melalui penawaran sumberdaya lokal yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan

lembaga sosial melalui kontribusi penyediaan pelayanan sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat. BUMDes telah memberikan kontribusi positif bagi penguatan ekonomi di pedesaan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat (Alkadafi, 2014). Ciri utama BUMDes yang membedakan lembaga komersial lain (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007) adalah (1) Badan usaha merupakan milik desa dan pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama; (2) Modal usaha sebesar 51% berasal dari dana desa dan 49% berasal dari dana masyarakat; (3) Operasionalisasi dilakukan berdasarkan pada falsafah bisnis berbasis budaya lokal; (4) Potensi yang dimiliki desa dan hasil informasi pasar yang tersedia menjadi dasar untuk menjalankan bidang usaha; (5) Laba yang diperoleh BUMDes dipergunakan untuk upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat berdasarkan peraturan yang telah disusun; (6) Fasilitas ditunjang oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Pemerintah desa; dan (7) Pelaksanaan operasionalisasi BUMDes diawasi secara bersama oleh Pemerintah Desa, BPD beserta anggota.

### **Hubungan Bumdes dengan Perbaikan Ekonomi dan Sosila Masyarakat**

Visi pembangunan yang mengutamakan manusia sangat relevan karena adanya pergeseran peranan pemerintah dalam konteks pembangunan, yang pada hakekatnya dilaksanakan oleh masyarakat. Sejak perencanaan hingga implementasi dan pemanfaatannya, peranan masyarakat yang menonjol. Peran itu lebih efektif apabila masyarakat juga berperan dalam penggunaan alokasi anggaran. Korten (2012 :242-245) mengemukakan bahwa pembangunan itu sendiri haruslah merupakan suatu proses belajar, yaitu maksudnya peningkatan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif yang tidak hanya menyesuaikan diri pada perubahan, melainkan juga untuk mengarahkan perubahan itu sehingga sesuai dengan tujuannya sendiri. Perbaikan ekonomi masyarakat tidak mungkin tercapai tanpa ada upaya sadar yang dilakukan oleh mereka. Midgley (1995:78-79) mengemukakan ada beberapa aspek dalam pembangunan desa, diantaranya mementingkan proses dan adanya

intervensi. Dua hal tersebut perlu disoroti karena terkait dengan konsep pemberdayaan. Suatu program pembangunan yang hanya mementingkan hasilnya untuk dipersembahkan pada masyarakat justru mengingkari martabat masyarakat, karena hal tersebut menghambat masyarakat untuk berperan serta dalam proses. Sedangkan intervensi dimaksudkan bahwa dalam pencapaian perubahan sosial dengan pemerataan kesejahteraan bagi semua penduduk tidak terlepas dari campur tangan pemerintah, karena pemerintah yang menguasai berbagai sumber daya (*Strategies for Social Development by Governments*). Purnamasari, Yulyana, dan Ramdani, 2016. Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Berbasis Ekonomi Kerakyatan di Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang; menyimpulkan bahwa Keberadaan BUM Desa sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), diharapkan Pemerintah Desa dapat memahami tentang pembentukan dan pengelolaan BUM Desa, sehingga dapat dijadikan sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, khususnya desa tertinggal atau desa yang tingkat perekonomiannya rendah. Desa Warung Bambu adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang yang telah memiliki BUM Desa namun selama ini belum mampu memberdayakan dan meningkatkan perekonomian masyarakat desanya.

Fitriska. 2017. Membuktikan bahwa Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara, saat ini belum berjalan dengan maksimal antara lain kurangnya pemahaman masyarakat mengenai BUMDes serta masyarakat belum dapat merasakan manfaat dari keberadaan BUMDes Jaya Gemilang Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara.

Mustanir, 2019. Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa Melalui Kelompok Ekonomi Kewirausahaan Secara Partisipatif. Menemukan bahwa. Empat hal yang perlu kita pikirkan bersama dalam pengelolaan BUMDes. *pertama*, mengenali dan menggali potensi masing-masing desa dan mencari cara untuk mengelola potensi

tersebut. *Kedua*, mendorong aliran dana CSR oleh swasta untuk mendukung permodalan BUMDes. *Ketiga*, mendorong munculnya inisiasi dari pemerintah desa. *Keempat*, mendorong peningkatan partisipasi masyarakat secara nyata. Dengan melakukan sedikitnya empat hal tersebut diharapkan ke depan setiap desa mampu memiliki BUMDes yang bisa turut menopang perekonomian masyarakat desa. Hakekat pemberdayaan masyarakat adalah upaya dan proses yang dilakukan supaya masyarakat memiliki keleluasaan dalam menentukan pilihan-pilihan dalam hidupnya yang lebih khas dan lokal itu. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan desa. Mereka dapat menggerakkan segala potensi yang dimilikinya untuk dapat turut mewarnai hasil pembangunan yang diharapkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Namun yang terpenting adalah bagaimana mengakomodir domain sosial, ekonomi, kultural dalam proses pemberdayaan masyarakat, disamping domain politik. Dengan begitu maka dapat difahami bahwa tujuan pendirian Bumdes paling tidak mengandung empat (4) hal yaitu; Badan Usaha Milik Desa merupakan Lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pendirian BUMDesa harus didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDesa dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, (*'user-owned, user-benefited, and user-controlled'*), transparansi, emansipatif, akuntabel, dan sustainabel dengan mekanisme *member-base* dan *self-help*. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUMDesa harus dilakukan secara profesional dan mandiri. Ovi Era Tama dan Yanuardi, 2018. Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bagi Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDES Karangrejek telah berhasil memberi dampak yang positif bagi peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat meskipun unit-unit dari BUMDES belum berjalan secara

keseluruhan. BUMDES Karangrejek juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat desa yang lebih terjamin. Pembangunan desa pun semakin lancer dengan adanya dana yang dihasilkan dari BUMDES. Selain itu adanya tingkat partisipasi masyarakat yang begitu tinggi membuat BUMDES Karangrejek semakin maju.

Tujuan dari kesejahteraan berdasarkan UU Nomor 11 Pasal 3 Tahun 2009, adalah sebagai berikut: 1) Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup. 2) Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian. 3) Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial. 4) Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan. 5) Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

#### **Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Bobanehena Kecamatan Jailol Kabupaten Halmahera Barat. Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Desember 2019 sampai dengan Januari 2020.

#### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu;

##### **a. Data Primer**

Data yang diperoleh langsung di lapangan ketika penelitian dilakukan. Data ini dikumpulkan secara langsung di lapangan melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi terhadap Kepala Desa Bobanehena, Ketua BUMDES, Ketua unit-unit usaha BUMDES, pengurus BUMDES dan masyarakat pengguna BUMDES.

##### **b. Data Sekunder**

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari data sekunder berupa laporan pertanggungjawaban BUMDES, profil BUMDES, data penduduk Desa Bobanehena yang meliputi data tingkat kesejahteraan, tingkat pengangguran, dll serta data-data lain yang terkait dengan BUMDES yang peneliti peroleh dari media publik.

## Metode Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara dilakukan menggunakan pendekatan wawancara semi terstruktur dengan menggunakan petunjuk umum atau panduan wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan pengurus BUMDES Tarakan, petugas pemerintahan Desa Bobanehena, dan masyarakat Desa Bobanehena. Pemilihan subjek wawancara ini dengan mempertimbangkan pengetahuan subjek tentang informasi yang akan ditanyakan.

### b. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumen internal yang digunakan antara lain struktur Profil Desa Bobanehena, data tingkat kesejahteraan penduduk, data tingkat pengangguran, profil BUMDES, serta laporan pertanggungjawaban BUMDES. Sedangkan dokumen eksternal yang digunakan antara lain koran-koran lokal dll. Selain itu juga peneliti melakukan pencarian (*searching*) berita-berita yang berkaitan dengan dampak BUMDES bagi kesejahteraan masyarakat desa.

### c. Observasi

Kegiatan pengamatan terhadap obyek penelitian ini untuk memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Observasi dalam penelitian ini adalah pengamatan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pengurus BUMDES dan pemerintah desa.

## Teknik Analisis Data

Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis data sebagai berikut:

### a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, serta mengumpulkan data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil wawancara dengan informan penelitian dan dokumen di lapangan yang berkaitan dengan dampak kebijakan BUMDES bagi Kesejahteraan masyarakat di Desa Bobanehena.

### b. Reduksi Data

Dalam penelitian ini peneliti mereduksi dan memilah data hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Karena data yang diperoleh dari lapangan masih kompleks dan

bersifat mentah. Maka peneliti hanya akan memilih data yang benar-benar relevan berkaitan dengan dampak BUMDES bagi kesejahteraan masyarakat di Desa Bobanehena.

### c. Display Data

Data disajikan dalam bentuk teks naratif untuk menjelaskan proses yang terjadi dari tahap perencanaan pembangunan BUMDES hingga tahap implementasi serta dampak yang ditimbulkan bagi kesejahteraan masyarakat Desa Bobanehena. Dari data yang telah disajikan tersebut kemudian diolah berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya untuk memperoleh gambaran secara jelas. Keseluruhan data yang telah diolah peneliti tersebut kemudian dikumpulkan menjadi satu oleh peneliti untuk kemudian disajikan hingga mencapai tahap kesimpulan

### d. Verifikasi dan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan diarahkan kepada hal-hal yang umum untuk mengetahui jawaban dari permasalahan. Permasalahan penelitian ini berkaitan dengan dampak BUMDES bagi kesejahteraan masyarakat di Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.

Untuk mengetahui dampak dari adanya Bumdes perlu adanya evaluasi. Evaluasi dampak dalam penelitian ini menggunakan jenis studi evaluasi yang dikemukakan oleh Finsterbusch dan Motz (dalam Wibawa, 1994: 74) yaitu menggunakan *single program before after*. Dimana evaluator hanya menggunakan kelompok eksperimen yaitu kelompok yang dikenai kebijakan untuk memperoleh data dari evaluasi dampak kebijakan ini. Kelompok yang dikenai kebijakan disini adalah masyarakat desa Bobanehena. Dalam menggunakan jenis evaluasi *single program before after* ini untuk memperoleh data mengenai keadaan masyarakat sebelum dan setelah adanya BUMDES.

## Peningkatan Status Sosial Masyarakat Desa Bobanehene Melalui Eksistensi BUMDesa

Keberadaan BUMDes tidak dipungkiri membawa perubahan di bidang ekonomi dan sosial. Dan sebagai lembaga sosial, BUMDes

harus berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Artinya, aktivitas BUMDes tidak hanya berbicara soal bisnis, tetapi juga mempertimbangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat setempat. Adapaun fungsi BUMDes adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan sumber pendapatan desa, BUMDes menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat desa melalui pengelolaan dan bergulir dan simpan pinjam.

2. BUMDes hadir bukan untuk berorientasi pada keuntungan tetapi lebih mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

3. Untuk Mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi yang ada di desa tersebut.

Bentuk fungsi sosial yang dijalankan BUMDes Tarakan Desa Bobanehena diantaranya adanya pelatihan, pengembangan, pendampingan, dan evaluasi secara berkelanjutan terutama terkait dengan unit usaha yang dijalankan.

**Tabel 1**  
**Perkembangan Hasil Pembangunan Sosial Desa Bobanehena**

No	Sasaran Obyek	Tingkat Perkembangan		Keterangan
		Kondisi Awal	Kondisi Saat ini	
1	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Tahun 2000 ditetapkan sebagai desa penerima IDT dengan angka kemiskinan 61,6%	Angka kemiskinan turun menjadi 14,12% pada akhir tahun 2019	Berkembangnya Usaha Ekonomi Masyarakat, dan melalui BUMDes Tarakan kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Bobanehena semakin baik
2	Sektor Pendidikan	Masyarakat Desa Bobanehena sebelum adanya Bumdes, belum pernah diikutkan dalam pelatihan manajemen pengelolaan usaha	Sesuai dengan fungsinya (BUMDes) maka sebelum dilajankan unit usaha, pengurus dan masyarakat diikutkan dalam pelatihan guna memiliki pengetahuan minimal terkait rencana usaha yang kan dijalankan	Karena ada 4 unit usaha yang dijalankan maka ada kurang lebih 40 masyarakat desa diberikan pelatihan sesuai pilihan unit usaha yang akan dijalankan.
4	Sektor Kesehatan	Sebelum adanya BUMDes Tarakan Pelayanan Kesehatan (Posyandu) di Desa Bobanehena tidak berjalan maskimal.	Dengan adanya BUMDes, Tarakan bekerjasama dengan petugas kesehatan, maka sejak tahun 2017 Posyandi di Desa Bobanehena berjalan dengan baik dan peyanan kesehatan semakn baik	Kondisi Kesehatan terutama Ibu-Ibu hamil dan anak-anak lebih baik terlayani. Dan ditahun 2019 Desa Bobanehen tidak lagi sebagai desa penyumbang stanting.

Tetapi, faktor yang paling utama keberhasilan BUMDes sesungguhnya bukan sumber daya alam atau modal uang penyertaan melainkan Sumber Daya Manusia (SDM). Bagaimanapun semua potensi yang ada bakal terbukti bisa menjadi komoditas yang produktif atau tidak semuanya tergantung pada bagaimana SDM mengelolanya. Bumdes Tarakan Desa Bobanehena saat ini berhasil menciptakan manfaat sosial sekaligus mendapatkan income sebagai lembaga usaha dan menjadikan BUMDes sebagai kekuatan pendorong perkembangan ekonomi desa. Artinya jika BUMDes benar-benar telah menjalankan tugasnya sebagai unit

usaha milik desa yang menggunakan aset dan potensinya untuk menciptakan kesejahteraan desa, sudah jelas BUMDes akan menjadi raksasa ekonomi yang kuat dan mandiri bagi seluruh masyarakat Desa Bobanehena. Temuan diatas sejalan dengan penelitan Sugiro dan Sukraliawan (2016) terkait Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial (*Studi Tentang Bumdes "Banjarasem Mandara" di Ddesa Banjarasem Kecamatan Sseririt Kabupaten Buleleng*) menunjukkan bahwa BUMDes "BANJARASEM MANDARA" sudah berperan sangat baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Desa Banjarasem. Dan usaha yang dijalankan memberi manfaat yang besar terhadap pembangunan desa dan secara sosial BUMDes ini menjadi jembatan dalam membantu masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga desa.

Temuan dilapangan menunjukkan peran BUMDes Tarakan sudah mampu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Desa Bobanehena. Dengan demikian pembangunan di desa melalui BUMDes menurut (Yansen; 2014;1), bahwa pembangunan harus dimaknai sebuah poses yang harus dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah melalui program-program BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Artinya untuk bisa mengukur capaian keberhasilan suatu program, diperlukan evaluasi. Untuk mengetahui dampak perlu adanya evaluasi. Evaluasi dampak dalam penelitian ini menggunakan jenis studi evaluasi yang dikemukakan oleh Finsterbusch dan Motz (dalam Wibawa, 2014: 74) yaitu menggunakan *Single Program Before After*. Dimana evaluator hanya menggunakan kelompok eksperimen yaitu kelompok yang dikenai kebijakan untuk memperoleh data dari evaluasi dampak kebijakan ini.

Berdasarkan laporan badan pengawas, pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan manajemen dan operasional tujuannya adalah untuk mencari keselarasan antara program atau tujuan BUMDes dengan ketercapaiannya evaluasi yang dilakukan terhadap program atau usaha yang dijalankan BUMDes TARAKAN” permasalahan yang muncul segera dicarikan solusi pemecahannya. Evaluasi terhadap program kerja dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan sangat penting untuk mengetahui kualitas kinerja. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Subarsono (2005 : 123), bahwa dengan evaluasi kebijakan-kebijakan ke depan akan lebih baik dan tidak mengulangi kesahan yang sama. Lebih lanjut Subarsono (2005 : 123) mengungkapkan bahwa alasan dilakukakannya evaluasi kebijakan diantaranya adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas suatu kebijakan, serta mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal.

### **Peningkatan Status Sosial (Bidang Kesehatan) Masyarakat Desa Bobanehena Melalui Eksistensi BUMDesa**

Salah satu masalah mendasar bagi masyarakat di desa adalah keterbatasan masyarakat dapat mengakses pasar, sehingga hasil panen perekebunan (buah-buahan dan sayur-sayuran) mereka dijual kepada tengkulak dengan harga murah, padahal biaya kesehatan sangat mahal, jika anak kami sakit dan harus dibawah ke puskesmas yang ada di ibu kota Kabupaten, biaya transportasinya sudah mahal, karena di desa Bobanehena hingga tahun 2017 setelah berdirinya BUMDes Tarakan, maka masyarakat di desa Bobanehena sudah lebih mudah mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Seperti pernyataan dari salah satu warga Desa Bobanehena yaitu Bapak Abdul Malik bahwa:

*“Setelah adanya bumdes TARAKAN yang bekerja sama dengan Bidan Desa untuk mengaktifkan kembali pelayanan Posyandu masyarakat di Desa Bobanehena sudah lebih mudah mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Dan jika anak-anak kima sakin, langsung dibawah ke Pos Yandu untuk mendapatkan pertolongan bidan yang ada di desa wawancara tgl 13 Januari 2020).*

Salah satu cara untuk mendorong pembangunan di pedesaan adalah pemerintah desa diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengelola secara mandiri lingkup desa mereka melalui lembagalembaga ekonomi di tingkat desa. Lembaga-lembaga tersebut salah satunya adalah dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menjelaskan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Kebutuhan dan potensi desa inilah yang kemudian menjadi dasar dalam pendirian BUMDes sebagai bentuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, dalam Undang-undang NO. 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes yang digunakan untuk mengatur dan menggerakkan tidak semata-masi masalah perekonomian sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa, tetapi faktor sosial (termasuk kesehatan) menjadi sangat penting. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bidang Desa Bobanehena Ibu Nurbaiti Jumati:

*“Bagi kami sebagai tenaga kesehatan yang bertugas di desa, tantangan terbesar adalah pada bagaimana kami dapat menyainkan kepada masyarakat di desa untuk tidak segan-segan berobat jika sakit, memeriksakan kandunganya secara rutin setiap bulan di Pos Yandu, mengikuti aturan yang diberikan jika ada ibu yang hamil, dan alhamdulillah di Desa Bobanehena Pemerintah desa melalui kebijakan kepala desanya mengaktifkan kembali Pos Yandu sehingga melalui Dana Desa yang ada, dan ini sangat membantu kami dalam menjalankan program-program di bidang kesehatan yang menjadi target kami (wawancara tgl 22 Desember 2019).*

BUMDes didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang merupakan prakarsa masyarakat desa. Artinya usaha yang kelak akan diwujudkan adalah digali dari keinginan dan hasrat untuk menciptakan sebuah kemajuan di dalam masyarakat desa. Salah satu indikator dari suksesnya program BUMDes adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, peneliti menyakini keterlibatan banyak pihak ke desa selama mengikuti gerak kemajuan masyarakat. Misalnya, ada perusahaan atau Bank yang ingin membantu sebuah desa, maka ini akan sangat membantu terutama di bidang kesehatan.

### **Peningkatan Status Sosial Bidang Pendidikan Masyarakat Desa Bobanehena Melalui Eksistensi BUMDesa**

Faktor pendidikan yang ditekankan disini adalah pendidikan non formal bagi masyarakat yang akan mengembangkan dan mengelola potensi sumberdaya alam yang ada di desa termasuk Desa Bobanehena. Ada potensi sektor perikanan, ada potensi sektor pariwisata, ada potensi sektor pertanian (khususnya hortikultura) dan sektor perikanan serta kerajinan rakyat. Kendala yang selama ini dihadapi oleh masyarakat di desa Bobanehena ada pada soal ketrampilan dan keahlian tertentu yang sangat terbatas sehingga tidak secara maksimal mengelola potensi sumberdaya alam yang tersedia di desa mereka.

Pada dasarnya pendirian dan pengelolaan BUMDes sebagai wujud dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilaksanakan secara kooperatif, untuk itu membutuhkan pengelolaan BUMDes yang serius agar dapat memaksimalkan potensi desa. BUMDes TARAKAN Desa Bobanehena juga mengambil peran penting dalam mengkitakan pendidikan dan pelatihan bagi ibu-ibu di desa untuk membuat keripk pisang mulu bebe. Hasil wawancara dengan penanggungjawab kegiatan ibu Nurjana Badarun menjelaskan.....

*Selama tiga haris kami berkumpul dan memandang tim pelatih dari dinas koperasi dan UMK Halmahera Barat untuk memberikan pelatihan pembuatan kerepek pisang mulu bebe dan kerepek Ubi kayu dan Ubi Jalar, dan hasil produksi kami akan kami pasarkan di tempat wisata dan saat Festifal Teluk Jailolo, dan hasilnya sangat membantu meningkatkan pendapatan ibu-ibu disini.(wawancara thl 20 Desember 2019)*

Melalui pengkgiatan ketrampilan sepertilah yang diharapkan terus dilakukan oleh BUMDes Tarakan untuk mendorong percepatan pemerataan ekonomi di desa. Selain pendidikan non formal bagi ibu-ibu juga untuk bapak-bapak yang berusaha di sektor pertanian tanaman hortikultura dan sektor perikanan, juga diberikan pelatihan. Midgley (2018:78-79) mengemukakan ada beberapa aspek dalam pembangunan desa, diantaranya mementingkan proses dan adanya intervensi. Dua hal tersebut perlu disoroti karena terkait dengan konsep pemberdayaan. Suatu program pembangunan yang hanya mementingkan hasilnya untuk dipersembahkan pada masyarakat justru mengingkari martabat masyarakat, karena hal tersebut menghambat masyarakat untuk berperan serta dalam proses. Sedangkan intervensi dimaksudkan bahwa dalam pencapaian perubahan sosial dengan pemerataan kesejahteraan bagi semua penduduk tidak terlepas dari campur tangan pemerintah, karena pemerintah yang menguasai berbagai sumber daya (*Strategies for Social Development by Governments*).

### **Dampak Ekonomi Terhadap Masyarakat Desa Bobanehena Setelah Adanya BUMDes**

Perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat menunjukkan perubahan yang lebih baik, setelah dibentuknya MUMDes Tarakan tahun 2017, dan ditetapkan oleh pemerintah Desa Bobanehena untuk membuka empat (4) unit usaha, sesuai dengan potensi ekonomi yang dimiliki Desa Bobanehena.

#### **Unit Usaha Parawisata.**

Unit usaha parawisata yang dikelola Bumdes Tarakan di Desa Bobanehena, mendapat perhatian yang cukup baik dari pemerintah Halmahera Barat. Melalui pola kemitraan dengan Bank Rakyat Indonesia Cabang Jailolo memberikan bantuan permodal dalam bentuk membangun rumah wisata. Melalui Pokdarwis (Pokja Sadar Wisata) yang mengelola wisata Tanjung Rappa Pelangi. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) merupakan kelembagaan ditingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya sapa pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan memanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.

Kelompok ini bersifat informal sebagai wadah bertukar pikiran, kegiatan, pembicaraan dan pengembangan dalam rangka mencapai tujuan agar wilayah wisata Tanjung Rappa Pelangi dapat menjadi wilayah yang mempunyai daya tarik wisata serta menjadi desa wisata. Pokdarwis merupakan kelompok swadaya dan swakarsa masyarakat yang dalam aktivitas sosialnya berupaya untuk meningkatkan pemahaman kepariwisataan, meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan, meningkatkan nilai manfaat kepariwisataan bagi masyarakat atau anggota Pokdarwis serta mensukseskan pembangunan kepariwisataan.

Tanjung Rappa Pelangi adalah destinasi berupa pantai. Lokasinya berada di Desa Wisata Bobanehena, Jailolo. Tempat ini memiliki banyak pohon bakau, dan dilengkapi dengan

banyak spot untuk berfoto. Sejak tahun 2009 Tanjung Rappa Pelangi oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Barat menjadikan sebagai lokasi Festival Teluk Jailolo (FTJ). Sejak ada agenda tahunan Festival Teluk Jailolo dari pemerintah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2010, Tanjung Rappa Pelangi di Desa Bobanehena menjadi salah satu destinasi wisata favorit daerah ini. Hasil wawancara dengan Ibu Ani salah satu pengelola lokasi wisata Tanjung Rappa Pelangi menjelsakan :

*Sementara itu, para pengunjung yang ingin menikmati destinasi itu lebih lama, atau ingin bermalam, bisa dengan memilih fasilitas wisata seperti rumah inap. Tarif rumah inap Rp300.000 per hari. Saya (Ani), bertugas menjual karcis masuk kepada Cermat, bercerita, rumah inap tersebut bahkan pernah dipakai oleh wisatawan mancanegara. "Baru beberapa hari yang lalu, ada wisatawan dari Rusia, mereka bermalam di sini," Destinasi tersebut memang cukup diminati. Ani bilang, setiap hari selalu saja ada pengunjung. Bahkan untuk hari Sabtu dan Minggu, keuntungan yang diraih dari para pengunjung bisa mencapai Rp 600.000 sampai Rp1.000.000. Sedangkan untuk hari Senin hingga Jumat, berkisar antara Rp 200.000 sampai Rp 300.000.(.... wawancara tanggal 11 Desember 2019)*

Lima tahun lima (5) tahun terakhir penerimaan BUMDes Tarakan Desa Bobanehena dari unit usaha parawisata terus meningkat. Keberhasil pengelolaan Bumdes ini terbukti tahun 2018 ada tiga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) yang juga merupakan BUMDes binaan Kementrian Desa dan daerah Tertinggal (Kemendes) dan BANK BRI, diikuti pameran produk unggulan Daerah Halmahera Barat di Kegiatan *Archipelago Expo* Kuala Lumpur Malaysia pada 2 – 5 April 2018. Bila dirata-ratakan setiap minggu penerimaan Bumdes Tarakan sebesar Rp. 3.000.000, maka setiap bulan mencapai Rp. 10.000.000 sampai dengan Rp. 12.000.000.

**Tabel 2.**  
**Perkembangan Rata-Rata Penerimaan**  
**BUMDesa Tarakan dari Sektor Parawisata 2017-2019**

Tahun	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Keuntungan Bersih (Rp)
2017	78.000.000	51.000.000	27.000.000
2018	89.000.300	56.000.250	33.000.050
2019	115.250.000	69.500.000	45.750.000
Jumlah	282.250.300	176.500.250	105.750.050
Rata-rata	94.083.433	58.833.416	33.250.016

Sumber : Laporan Keuangan Bumdes Tarakan, 2019

Keuntungan bersih BUMDes Tarakan tiga (3) tahun terakhir memperlihatkan peningkatan yang cukup baik, dan rata-rata keuntungan sudah mencapai Rp. 33.250.016 ribu rupiah per tahun. Bila dicermati dari sisi angka rupiah masih sangat kecil, tetapi ini menjadikan motivasi bagi pengelola BUMDes Tarakan terus meningkatkan pelayanan dan menambah fasilitas pendukung di lokasi wisata Tanjung Rappa Pelangi.

Hasil wawancara dengan Bapak Iswan yang menjabat kepala Desa Bobanehena tahun 2015 hingga 2017, menjelaskan bahwa....

*Dengan upaya selama ini kami lakukan, akhirnya membuahkan hasil dengan mendapatkan perhatian penuh dari pemdal Halbar melalui Dinas Parawisata. Semua itu kembali kepada keihlasan kita untuk berbuat baik terhadap desa dan Alhamdulillah tidak sia-sia. Untuk saat ini fasilitas pendukung diantaranya 8 unit gazebo, 1 unit sasadu, 5 unit Cotage (Bongalou) dan masih banyak failitas yang lainnya..... 12 Desember 2019).*

Dalam kesempatan yang sama, Bank [BRI](#) juga memberikan bantuan Sarana Prasarana kepada 2 (dua) BUMDes di [Halmahera](#) Barat yang ditetapkan sebagai BUMDes Percontohan [BRI](#). Kedua BUMDes tersebut adalah BUMDes Sri Rejeki di Desa Golago Kusuma yang bergerak di unit usaha pertanian dan BUMDes Tarakan di Desa Bobanehena yang bekerjasama dengan Pokdarwis setempat mengelola wisata tanjung Rappa Pelangi. Hasil wawancara dengan pimpinan unit [BRI](#) Jailolo Bapak Bambang bahwa :

*Bank [BRI](#) telah mulai melakukan pendampingan kepada BUMDes-BUMDes di Indonesia bersama dengan pihak Kementerian Desa PDTT di akhir tahun 2016. Hingga kini Bank [BRI](#) telah menjalin kemitraan dengan lebih dari*

*14.000 BUMDes di seluruh Indonesia. Keberadaan Agen [BRILink](#) di BUMDes yang didukung jaringan [BRISat](#) ini disambut antusias oleh masyarakat sekitar karena telah berhasil mendekatkan akses keuangan di desanya. Kini warga desa tidak perlu lagi mengeluarkan ongkos transportasi hingga ratusan ribu rupiah hanya untuk pergi menabung, melakukan transfer uang, menyetor cicilan pinjaman atau membayar listrik ke Kantor Cabang Bank terdekat. Adanya dukungan Bank [BRI](#) kepada BUMDes melalui pemasangan jaringan komunikasi Satelit [BRISat](#) dan melalui program BUMDes Percontohan, diharapkan dapat lebih memotivasi BUMDes untuk maju mengembangkan potensi ekonomi desanya dan lebih mendekatkan akses warga desa kepada layanan keuangan perbankan di desanya. Bank [BRI](#) terus berkomitmen untuk memberikan dukungan pengembangan ekonomi Desa salah satunya melalui BUMDes. Maju BUMDesku Bersama Bank [BRI](#). (Wawancara dengan Bapak Bambang Tgl 13 Desember 2019).*

Peran lembaga di sebuah desa sangat penting untuk membantu kebutuhan masyarakat. Keberadaan lembaga BUMDes Tarakan ini memiliki fungsi yang mampu memberikan “energi sosial” yaitu sebuah kerjasama diantara segenap komponen, kerja sama mutlak dibutuhkan dalam kelembagaan yang mengarah pada pembangunan.

#### **Unit Usaha Pertanian**

Saat ini BUMDesa Tarakan bekerja sama dengan masyarakat petani Desa Bobanehena mengembangkan tanaman hortikultura sayur-sayuran. Melalui pola kemitraan seperti ini dengan sistem bagi hasil, diharapkan memberi keuntungan secara ekonomi baik kepada

masyarakat maupun BUMDes. Dari hasil usaha sektor pertanian khususnya tamana sayur-sayuran, tomat, rica dan buah-buwahan para petani telah menikmati hasilnya. Hasil wawancara dengan Bapak Yunus Baja petani sayur di lahan garapan bersama yang di kelola BUMDesa Tarakan Menjelaskan.....

*Sebelum saya bergabung dan bekerja di lahan yang dikelola BUMDesa Tarakan, pendapatan saya dari usaha kebun saya hanya Rp.300.000 sampai Rp.370.000 saja setiap kali dijual., belum lagi saya harus mengeluarkan ongkos transportasi sampai di pasar Jailolo mencapai Rp.80.000 pergi dan pulang, sehingga keuntungan bersih yang bisa saya terima hanya sebesar Rp. 150.000 sampa Rp. 180.000 saja. Namun setelah saya bergabung dengan Bumdes tarakan dan bekerja menggarap lahan yang dikelola BUMDes saya bisa terima uang Rp.500.000 sampai dengan Rp. 1000.000. karena hasil penen langsung dibeli BUMDes sehingga saya tidak mengeluarkan ongkos lagi. Dan dari hasil kebun saya sediri langsung BUMDes yang beli. Ini sangat membantu kami petani di Desa Bobanehena. (Wawancara dengan Bapak Yunus Baja tgl 19 Desember 2019).*

Kendala bagi masyarakat desa Bobanehena selama ini mulai teratasi dengan adanya pengembangan usaha BUMDesa Tarakan di Sektor pertanian. Disadari bahwa secara empiris memang sektor pertanian cenderung bernilai tambah kecil dan para tenaga kerjanya cenderung telah berusia 50 - 60 tahun. Mayoritas tenaga kerjanya juga memiliki latar pendidikan yang rendah dengan jumlah SDM yang tidak bersekolah-tamatan SD mencapai 68,02 persen, SMP sebesar 16,51 persen, SMA/SMK sebesar 13,61 persen, dan lulusan perguruan tinggi hanya mencapai 1,86 persen (BPS, 2019).

Faktor SDM sendiri sangat berpengaruh pada perilaku dan efeknya juga menjalar pada gaya pengelolaan yang terlalu tradisional. Karena itu, hanya sentuhan teknologi dan berbagai bentuk insentif bersaing yang akan merangsang minat generasi muda dan inovasi untuk mengembangkan usaha di sektor pertanian (Ananda, 2019). Keberadaan sektor pertanian masih sangat penting terhadap pembangunan Indonesia. Alasan yang pertama, sektor pertanian merupakan palang pintu ketahanan pangan. Ketahanan pangan sendiri nanti akan berimplikasi positif pada kecukupan gizi dan standar hidup layak (kesejahteraan) bagi penduduk di suatu wilayah. Peningkatan jumlah penduduk juga akan menuntut ketersediaan pangan yang kian membesar sehingga produktivitas pertanian perlu dijaga untuk menjamin kualitas hidup yang lebih baik dan berimbang. Kedua, pertanian merupakan ciri kultural Indonesia sebagai negara agraris, terutama di wilayah perdesaan. Potensi ini harus mampu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan perbaikan ekonomi masyarakat petani di desa melalui kerjasama dengan BUMDesa. Ketiga, pertanian merupakan ladang pekerjaan utama bagi mayoritas tenaga kerja di Indonesia (29,46 persen). Kondisi ini terus berjalan selama beberapa dekade kendati tingkat persentasenya cenderung banyak mengalami penurunan. Akan tetapi, jumlah yang sangat besar tersebut kurang diikuti dengan pendapatan per kapita yang memadai. Nilai PDB per kapita yang dihasilkan pada 2018 hanya mencapai Rp 53,23 juta.

Pasca adanya BUMDes Tarakan masyarakat di Desa Bobanehena yang berprofesi sebagai petani mulai secara bertahaap bergabung dan bekerjasama dengan BUMDes Tarakan. Hasil pertanian mereka tidak lagi dijual ke pasar secara perorangan, terutama sayur-sayusan dan buah-buahan, tetapi menjual langsung ke Bundes.

**Tabel 3.**  
**Perkembangan Rata-Rata Pendapatan**  
**Petani Di Desa Bobanehena 2017-2019**

Tahun	Jlh Petani (Orang)	Penerimaan Petani (Rp)	Pengeluaran Petani (Rp)	Keuntungan Bersih Petani (Rp)
2017	31	24.600.000	7.750.000	16.750.000
2018	39	53.200.000	14.976.000	38.224.000
2019	44	106.400.000	29.040.000	77.360.000
Jumlah	114	184.200.000	51.766.000	132.334.000
<i>Rata-rata</i>		61.400.000	17.255.333	44.111.333

Sumber : Laporan Keuangan Bumdes Tarakan, 2019

Kerjasama petani dengan BUMDes Tarakan menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan bagi masyarakat Desa Bobanehena. Data tabel 4.2 menunjukkan adanya peningkatan pendapatan petani yang signifikan. Selain pendatan diterima langsung oleh petani saat menjual hasil kebunnya, mereka juga akan mendapatkan Sisal Hasil Usaha dari BUMDesa Tarakan pada akhir tahun setelah rapat anggota tahunan dilakukan. Hasil wawancara dengan kepala unit usaha pertanian BUMDes Tarakan bapak Muhlis Adam...

*Mereka (petani) Desa Bobanehena yang bergabung dengan kita (Bumdes Tarakan) akan menerima bagi hasil usaha di akhir tahun, dan besaran uang yang mereka (petani) terima berfariasi*

*antara Rp. 12.000.000 sampai dengan 13.500.000 ribu rupiah tergantung dari berapa banyak hasil usaha pertanian mereka jual ke kita (BUMDesa). Artinya semakin banyak hasil panen mereka jual ke kita, nanti pembahagian hasil usahanya juga semakin besar mereka akan terima.... (Wawancara 22 Januari 2020).*

Secara kumulatif usaha sektor pertanian khususnya hortikultura (sayur dan buah) memberi manfaat secara ekonomi sangat baik. BUMDesa Tarakan setiap hari bisa memperoleh penerimaan bersih sebesar Rp.212.351 ribu rupiah. Wawancara dengan bendahara BUMDesa Tarakan bapak Ade Rajak....

**Tabel 4.**  
**Perkembangan Rata-Rata Pendapatan BUMDes Tarakan**  
**Desa Bobanehena dari Usaha Sektor Pertanian 2017-2019**

Tahun	Penerimaan Bumdes (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Keuntungan Bersih Petani (Rp)
2017	76.400.000	27.750.000	48.750.000
2018	147.200.000	97.650.000	55.550.000
2019	254.500.000	129.040.000	125.040.000
Jumlah	488.100.000	254.340.000	229.340.000
<i>Rata-rata</i>	162.700.0000	84.780.000	76.446,666

Dari empat (4) unit usaha yang kami jalankan saat ini yaitu unit usaha Parawisata, unit usaha Perikanan, unit usaha Pertanian dan unit usaha Perdagangan dan Kerajinan, yang memberikan pemasukan untuk BUMDesa Tarakan paling besar adalah usaha pertanian khususnya sayur dan buah-buahan, baru perdagangan. Melalui pola kerjasama dan kemitraan dengan petani di Desa Bobanehena BUMDes Tarakan membeli hasil pertanian petani dan sudah mempunyai jaringan pedagang baik di pasar Jailolo maupun

di Pasar Ternate. Jadi setiap hari ada petugas kami dari BUMDes yang mengantarkan langsung ke Pasar Jailolo dan Ternate. Walaupun keuntungan setiap harinya kecil tapi ini sangat bagus. Wawancara tanggal 15 Januari 2020.

#### **Unit Usaha Perikanan**

Peluang sektor perikanan ini yang kemudian oleh BUMDes Tarakan Desa Bobanehena menjadikan sebagai salah satu unit usaha Bumdes. Selama tahun 207-2019 unit usaha sektor perikanan juga memberi kontribusi

cukup signifikan terhadap kemajuan Bumdes Tarakan. Dengan pola kemitraan BUMDesa Tarakan bekerjasama dengan nelayan di Desa Bobanehena yang berjumlah 430 orang, menjadi sangat penting. Unit usaha ini memberikan keuntungan bersih setiap hari kurang lebih Rp. 272.870. ribu rupiah. Yang menjadi kendala untuk usaha di sektor perikanan ini adalah ketidakpastian kondisi

alam yang kadang nelayan tidak mendapatkan hasil tangkapan secara maksimal. Tetapi secara keseluruhan nelayan yang tergabung dalam kerjasama dengan BUMDes Tarakan setiap hari bisa membawa pulang uang walaupun besarnya bervariasi, tergantung dari hasil tangkapan ikan masing-masing nelayan.

**Tabel 5**  
**Perkembangan Rata-Rata Pendapatan BUMDes Tarakan**  
**Desa Bobanehena dari Usaha Sektor Perikanan 2017-2019**

Tahun	Penerimaan Bumdes (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Keuntungan Bersih Petani (Rp)
2017	116.400.000	31.220.000	85.200.000
2018	155.200.000	63.500.000	91.700.000
2019	214.500.000	96.700.000	117.800.000
Jumlah	486.100.000	191.420.000	294.700.000
Rata-rata	162.033.333	63.806.666	98.233.333

Sumber : Laporan Keuangan Bumdes Tarakan, 2019

Hasil wawancara dengan seorang nelayan yang bermitra dengan BUMDesa Tarakan Bapak Jubar Ahmad menjelaskan:

*Sebelum adanya BUMDesa Tarakan, setiap kali saya melaut dan mendapatkan ikan harus dijual ke dibo-dibu yang harga murah, padahal saya sudah semalam suntuk mencari ikan dan dihargai dengan harga yang sangat murah. Tetapi setelah adanya BUMDesa Tarakan saya sangat terbantu. Berapapun jumlah hasil tangkapan yang saya dapat langsung dinayar lunas oleh petugas Bumdes, dan harganya sesuai. Jadi dengan adanya Bumdes ini sangat membantu saya dan keluarga. Saya bisa menyimpan uang dan bisa kasesekolah anak saya sampe tamat SMA, walaupun sekarang memang carai pekerjaan sulit, tapi paling tidak BUMDes Tarakan sudah sangat membantu kami di Desa Bobanehena.. Wawancara Tagal 21 Januari 2020.*

Perairan di Jailolo merupakan fishing ground berbagai ikan pelagis penting seperti tuna ekor kuning, tongkol, cakalang, tengiri, bubara, kembung, teri, cumi, lemuru dan lainnya. Perairan dangkalnya kaya beragam jenis ikan demersal seperti kerapu, kakap, ikan merah, termasuk lobster dan gurita. Hutan bakau yang

banyak tersebar di muara-muara sungai sepanjang pantai juga kaya dengan beragam kepiting, udang yang berperan penting sebagai daerah pengasuhan beragam ikan karang. Sumber daya pesisir menjadi semacam penunjang ekonomi dan sekaligus untuk pemenuhan gizi bagi masyarakat yang berada di wilayah pesisir. Masyarakat nelayan tidak semata-mata memperoleh penghasilan dari menangkap ikan, namun juga memperoleh ikan, kerang, udang, rumput laut, pada saat-saat laut sedang surut, atau yang umum dikenal dengan istilah lokal makameting. Kegiatan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya pesisir selain menangkap ikan, juga sebagian kecil melakukan budidaya rumput laut.

Desa Bobanehena merupakan salah satu desa yang sudah memiliki BUMDES sejak tahun 2017. Perencanaan dan pembentukan BUMDES TARAKAN ini adalah atas prakarsa dari seluruh masyarakat karena melihat kondisi potensi sumberdaya alam yang sangat besar, terutama sektor pariwisata, sektor pertanian, sektor perikanan dan sektor perdagangan serta kerajinan. Pendirian BUMDES ini mendapatkan dana dari pemerintah Desa Bobanehena melalui Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017.dengan harapan keberadaan BUMDes Tarakan mampu

memberikan solusi terhadap masalah ekonomi keluarga di Desa Bobanehena. Uphoff dalam Cernea (2018:500) menyatakan bahwa “Salah satu paradoks dalam mendorong partisipasi adalah bahwa dalam mempromosikan pembangunan dari bawah (*bottom up planning*), justru sering pula membutuhkan upaya dari atas.” Hal ini terlihat dalam program pemerintah melalui Tenaga Pendamping Profesional Indonesia (TPPI) yang ditugaskan mendampingi desa untuk bekerja dengan penduduk pedesaan dan mengembangkan kapasitas organisasi diantara mereka..

Pemerintah desa dalam menciptakan unit-unit BUMDesa ini sangat melihat kebutuhan masyarakat. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Manikam (2010) terkait Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa Di Desa Ngeposari Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2009 yang menemukan bahwa “BUMDES di desa tersebut dinilai gagal dan belum berjalan dengan baik. Kenyataan tersebut dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat desa yang masih rendah serta program-program badan usaha milik desa yang belum berjalan secara keseluruhan serta belum dapat mengakomodir kepentingan masyarakat,` potensi desa serta kebutuhan petani sebagaimana tujuan utama pendirian BUMDES tersebut.”

Suatu kebijakan akan menimbulkan suatu dampak. Dampak kebijakan public merupakan sebuah studi evaluasi terhadap suatu kebijakan pemerintah yang sudah diimplementasikan kepada sasaran kebijakan. Untuk mengetahui dampak perlu adanya evaluasi. Evaluasi dampak dalam penelitian ini menggunakan jenis studi evaluasi yang dikemukakan oleh Finsterbusch dan Motz (dalam Wibawa, 2014: 74) yaitu menggunakan *Single Program Before After*. Dimana evaluator hanya menggunakan kelompok eksperimen yaitu kelompok yang dikenai kebijakan untuk memperoleh data dari evaluasi dampak kebijakan ini.

Kelompok yang dikenai kebijakan disini adalah masyarakat desa Bobanehena. Dalam menggunakan jenis evaluasi *single program before after* ini untuk memperoleh data mengenai keadaan masyarakat sebelum dan setelah adanya BUMDes. BUMDes Tarakan terbukti memberi dampak positif di bidang ekonomi, pendidikan

dan kesehatan bagi masyarakat desa. Dampak yang paling terlihat adalah di bidang ekonomi karena BUMDes merupakan lembaga yang dibangun berdasarkan tujuannya yaitu memajukan ekonomi di pedesaan. Berikut tabel perkembangan hasil pembangunan dan dampak yang ditimbulkan dari sebelum dan setelah adanya BUMDes.

### Kesimpulan

Mencermati pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terbukti keberadaan BUMDes Tarakan membawa perubahan yang signifikan di bidang ekonomi masyarakat Desa Bobanehena. Melalui pola kemitraan dan kerjasama dengan masyarakat, hasil pertanian, perikanan dan usaha masyarakat lainnya dapat terjual melalui BUMDes, dan ada peningkatan pendapatan yang diterima masyarakat.
2. Terbukti keberadaan BUMDes Tarakan membawa perubahan yang signifikan di bidang pendidikan masyarakat khususnya pendidikan non formal dan informal. Masyarakat merasa sangat terbantu karena ada pelatihan dan penyuluhan yang dilakukan BUMDes Tarakan terkait manajemen pengelolaan usaha di desa Bobanehena.
3. Terbukti keberadaan BUMDes Tarakan membawa perubahan yang signifikan di bidang Kesehatan masyarakat karena setelah adanya BUMDes posyandi di Desa Tarakan dapat aktif kembali dan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik.

### Saran-saran

1. Agar mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih proaktif, dinamis dan partisipatif dalam setiap tahapan pembangunan desa, mendorong pemberdayaan perekonomian masyarakat desa agar lebih berdaya, mandiri, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa melalui pendidikan dan pelatihan formal maupun non formal.
2. Disarankan kepada pengelola BUMDes Tarakan Agar lebih meningkatkan sosialisasi kepada

masyarakat tentang pentingnya keberadaan BUMDes di Desa Bobanehena, dalam membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial, sehingga masyarakat semakin yakin dan percaya terhadap keberaan BUMDes.

## REFERENSI

- Amirullah,Widayat, 2002. *Riset Bisnis*, Edisi 1, Graha Ilmu, Yogyakarta. S.,Mulyadi, 2003. *Ekonomi sumber daya manusia dalam perspektif*,Jakarta:PTRaja Grafindo Persada.
- Agunggunanto,dkk, 2016. “Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)”, *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, Volume 3 Nomor 1, hal 67-81.
- Ambar Teguh Sulistyani. (2004). *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gava Media
- Asep Saefuddin, dkk. (2003). *Menuju Masyarakat Madani*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Andi Prastowo. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan*
- Bintarto, R. Prof. Dr. (2011). *Interaksi Desa-Kota*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia
- BKKBN. (1985). *Pelebngaan dan Pembudayaan NKKBS*. Jakarta: PUSDIKLAT Tenaga Program BKKBN.
- Burhan Bungin. (2012). *Anaisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fitriska. 2017. Membuktikan bahwa Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara,
- Hanif Nurcholis. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*.
- Jugiyanto, 2004.*Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*, Yogyakarta:BPFE
- Juliandi,Azuar dan Irfan, 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Bisnis*, Bandung:Citapustaka Media Perintis.
- Jayadinata,T. Johara dan Pramandika, 2006. *Pembangunan desa dalam perencanaan*, Bandung:Penerbit ITB.
- Mustanir, 2019. Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa Melalui Kelompok Ekonomi Kewirausahaan Secara Partisipatif.
- Nugroho,Dendhi Agung, 2015. “Evaluasi Penerapan dan Dampak Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) (Periode Mei 2014–April 2015)”. *JESP*,Vol. 7, No 2 : 79-84,ISSN 2086-1575. *Penelitian*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Ovi Era Tama dan Yanuardi, 2018. Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bagi Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul.
- PKDSP (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan), 2007. *Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*.Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Purnamasari, Yulyana, dan Ramdani, 2016. Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Berbasis Ekonomi Kerakyatan di Desa Warungbambu Kkecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang.